



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16856-16864

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Tingkat Kesiapan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan berdasarkan Standar IFRS S1 dan S2 pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Putri Andini Nurmaisya¹, Utami Puji Lestari²

¹²Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

¹putri.andini.nurmaisya.ak22@mhs.wpnj.ac.id, ²utami.lestari@akuntansi.wpnj.ac.id

Abstrak

Pengungkapan laporan keberlanjutan semakin penting dalam praktik bisnis global seiring dengan meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap informasi keberlanjutan perusahaan. Namun, keberagaman standar pelaporan yang digunakan masih menyebabkan rendahnya konsistensi informasi serta keterbandingan antarlaporan perusahaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, International Sustainability Standards Board (ISSB) menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2 yang kemudian diadopsi oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) menjadi PSPK 1 dan PSPK 2 yang berlaku efektif mulai tahun 2027. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mengadopsi standar tersebut karena karakteristik industrinya bersifat jangka panjang, padat modal, serta memiliki keterkaitan erat dengan aspek lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian berupa laporan keberlanjutan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengungkapan keberlanjutan sesuai IFRS S1 dan IFRS S2 selama periode penelitian. Meskipun demikian, tingkat kesiapan perusahaan masih bervariasi dan kualitas pengungkapan terkait transparansi, verifikasi, audit independen, risiko iklim, emisi karbon, serta target keberlanjutan masih relatif terbatas sehingga diperlukan integrasi yang lebih mendalam untuk mencapai kesesuaian penuh dengan IFRS S1 dan IFRS S2.

Kata Kunci: Pengungkapan Keberlanjutan, IFRS S1 dan IFRS S2, Sektor *Property* Dan *Real Estate*, Kesiapan Perusahaan.

1. Latar Belakang

Isu keberlanjutan telah menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis global seiring meningkatnya tuntutan investor, regulator, dan masyarakat terhadap transparansi informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG)[1]. Laporan keberlanjutan kini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi kinerja nonkeuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Survei KPMG [2] menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan besar dunia telah menerbitkan laporan keberlanjutan, mencerminkan meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pengungkapan.

Untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan informasi keberlanjutan, *International Sustainability Standards Board* (ISSB) menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2023 sebagai standar global pengungkapan keberlanjutan [3]. Di Indonesia, standar tersebut diadopsi menjadi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan PSPK 1 dan PSPK 2 yang akan berlaku efektif mulai 2027 [4]. Perubahan ini menuntut perusahaan memiliki kesiapan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang memadai agar implementasi standar berjalan efektif.

Sektor *property* dan *real estate* merupakan sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan melalui konsumsi energi, penggunaan material, dan emisi karbon. Karakteristik industri yang padat modal dan berorientasi jangka panjang menjadikan sektor ini menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi pengungkapan keberlanjutan sesuai standar internasional [5].

Teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, teori institusional, teori keagenan, dan konsep keberlanjutan menjadi landasan dalam menjelaskan kesiapan perusahaan mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan penerimaan masyarakat melalui pengungkapan informasi yang sesuai dengan norma yang berlaku [6]. Teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya penyediaan informasi yang transparan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan investor, regulator, dan masyarakat [7]. Sementara itu, teori institusional menjelaskan bahwa kesiapan perusahaan dipengaruhi oleh tekanan regulatif, normatif, dan mimetik yang mendorong organisasi menyesuaikan tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan sistem pelaporan [8]. Teori keagenan memandang pengungkapan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham untuk mengurangi asimetri informasi [9]. Seluruh teori tersebut selaras dengan konsep keberlanjutan yang menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi bisnis, sehingga kesiapan perusahaan dalam mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan respons terhadap penekanan yang semakin besar pada keberlanjutan, terutama dalam peringkat investasi dan kredit, telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik tersebut secara sukarela [10].

Penelitian ini berfokus pada tingkat kesiapan perusahaan dalam mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 sebelum penerapan wajib, khususnya pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia, masih terbatas. Hal tersebut dilakukan dengan menilai tingkat kesiapan perusahaan melalui *content analysis* terhadap laporan keberlanjutan berdasarkan standar IFRS S1 dan IFRS S2 pada periode pra-wajib. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kesiapan perusahaan menghadapi implementasi standar pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan IFRS S1 dan IFRS S2 pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* untuk menganalisis tingkat kesiapan pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan standar IFRS S1 dan IFRS S2 pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis dilakukan terhadap laporan keberlanjutan periode 2022–2025 untuk menggambarkan kesiapan perusahaan sebelum implementasi wajib standar keberlanjutan di Indonesia.

Populasi penelitian terdiri atas perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti [11] sehingga diperoleh 15 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keberlanjutan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI.
2. Perusahaan yang tercatat pada *listing board* kategori utama di BEI.
3. Perusahaan yang telah melakukan pencatatan saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di BEI sebelum atau pada tahun 2015.

Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel:

Tabel 1. Sampel Perusahaan

No	Kode	Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
3	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate
4	BKSL	Sentul City Tbk.
5	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.

6	CTRA	Ciputra Development Tbk.
7	DILD	Intiland Development Tbk.
8	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
9	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
10	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
11	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
12	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.
13	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
15	SMRA	Summarecon Agung Tbk.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dengan mengidentifikasi pengungkapan berdasarkan komponen IFRS S1 dan IFRS S2. Setiap indikator dinilai menggunakan metode *compliance rating* dengan rentang skor 0–3 [12]. Persentase tingkat kesiapan dihitung dari perbandingan total skor aktual terhadap skor maksimum, kemudian dibandingkan antarperiode 2022–2025 untuk mengevaluasi perkembangan kesiapan perusahaan. Tingkat kesiapan perusahaan terhadap standar IFRS S1 dan IFRS S2 diukur menggunakan skala 0-3, dengan penjelasan skor sebagai berikut:

- 0: Tidak terdapat pengungkapan terkait standar IFRS S1 dan IFRS S2.
- 1: Pengungkapan masih terbatas dan bersifat umum.
- 2: Pengungkapan cukup lengkap namun belum disertai verifikasi independen.
- 3: Pengungkapan lengkap dan telah diverifikasi oleh pihak independen.

Skor yang diperoleh pada setiap indikator kemudian diakumulasikan untuk seluruh periode penelitian tahun 2022–2025. Selanjutnya, total skor aktual dibandingkan dengan skor maksimum yang dapat dicapai untuk memperoleh persentase tingkat kesiapan pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 [13] dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesiapan (\%)} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Seluruhnya}} \times 100\%$$

Persentase tersebut digunakan untuk menginterpretasikan tingkat kesiapan perusahaan dalam mengadopsi pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 pada periode sukarela sebelum penerapan efektif tahun 2027.

Tabel 2. Persentase Tingkat Kesiapan

Persentase (%)	Tingkat Kesiapan
0% - 20%	Tidak Siap
>20% - 40%	Kurang Siap
>40% - 60%	Cukup Siap
>60% - 80%	Siap
>80% - 100%	Sangat Siap

3. Hasil dan Diskusi

Berikut ini kata kunci yang digunakan untuk melakukan analisis indikator kesesuaian antara laporan keberlanjutan dan standar IFRS S1 dan S2:

Tabel 3. Indikator Kata Kunci Pengkodean

Kategori	Subkategori Indikator Pengungkapan	Kata Kunci
Kategori 1: Transparansi dan Akuntabilitas (IFRS S1)	Transparansi & keterverifikasian data keberlanjutan yang diungkapkan	transparansi, data terverifikasi, verifikasi independen, laporan audit, akuntabilitas, keandalan data, verifikasi internal.
	Mekanisme audit independen	audit independen, laporan auditor, audit eksternal, verifikasi pihak ketiga, penilaian independen.
	Pengungkapan pemangku kepentingan & kepatuhan regulasi	keterlibatan pemangku kepentingan, pengungkapan pemangku kepentingan, kebijakan kepatuhan, regulasi, tata kelola perusahaan, kerangka hukum.
	Pengungkapan emisi karbon	emisi karbon, emisi gas rumah kaca, emisi CO ₂ , target pengurangan emisi, jejak karbon/limbah, penggunaan energi terbarukan
Kategori 2: Risiko Iklim dan Pengungkapan Emisi (IFRS S2)	Identifikasi risiko iklim (transisi & fisik)	risiko transisi, risiko fisik, dampak iklim, penilaian risiko perubahan iklim, strategi risiko lingkungan, risiko keuangan terkait iklim
	Strategi <i>net-zero</i> & target pengurangan emisi	<i>Net-zero</i> , target emisi, target <i>net-zero</i> 2060, offset karbon, komitmen iklim, <i>green building</i>

Adapun hasil analisis indikator pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai berikut:
Tabel 4. Jumlah Indikator Kategori Pengungkapan IFRS S1 dan IFRS 2

No	Kode	Perusahaan	Tahun	IFRS S1	IFRS S2	Analisis Kategori IFRS S1 & S2 Tahun	Total Kategori
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.	2022	9	11	20	98
			2023	12	10	22	
			2024	13	9	22	
			2025	16	18	34	
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	2022	12	11	23	90
			2023	7	9	16	
			2024	11	12	23	
			2025	15	13	28	
3	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate	2022	15	8	23	137
			2023	16	10	26	
			2024	28	16	44	
			2025	28	16	44	
4	BKSL	Sentul City Tbk.	2022	5	6	11	61
			2023	6	8	14	
			2024	6	8	14	
			2025	7	15	22	
5	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	2022	16	20	36	180
			2023	15	27	42	
			2024	19	28	47	
			2025	26	29	55	
6	CTRA	Ciputra Development Tbk.	2022	13	13	26	137
			2023	12	13	25	
			2024	18	20	38	
			2025	20	28	48	
7	DILD	Intiland Development Tbk.	2022	9	15	24	121
			2023	13	13	26	
			2024	14	20	34	
			2025	17	20	37	
8	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	2022	12	12	24	96
			2023	8	13	21	
			2024	9	16	25	
			2025	11	15	26	
9	JRPT	Jaya Real Property Tbk.	2022	9	10	19	97
			2023	12	12	24	
			2024	14	12	26	
			2025	14	14	28	
10	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	2022	12	8	20	119
			2023	10	15	25	
			2024	16	19	35	
			2025	19	20	39	
11	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	2022	0	0	0	120
			2023	12	17	29	
			2024	15	30	45	
			2025	17	29	46	
12	MMLP	Mega Manunggal Property Tbk.	2022	11	5	16	82
			2023	13	3	16	
			2024	14	10	24	
			2025	15	11	26	
13	MTLA	Metropolitan Land Tbk.	2022	12	9	21	101
			2023	10	10	20	
			2024	16	14	30	
			2025	14	16	30	
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	2022	14	15	29	129
			2023	14	16	30	
			2024	8	19	27	
			2025	15	28	43	
15	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	2022	12	17	29	123
			2023	17	14	31	
			2024	15	10	25	
			2025	13	25	38	

Berdasarkan Tabel 4, kinerja pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* selama periode 2022–2025 menunjukkan tingkat implementasi yang cukup beragam. Secara umum, pengungkapan IFRS S1 yang berkaitan dengan informasi keberlanjutan dapat ditemukan di semua perusahaan dibandingkan IFRS S2 yang berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Namun, sebagian perusahaan masih memiliki tingkat indikator

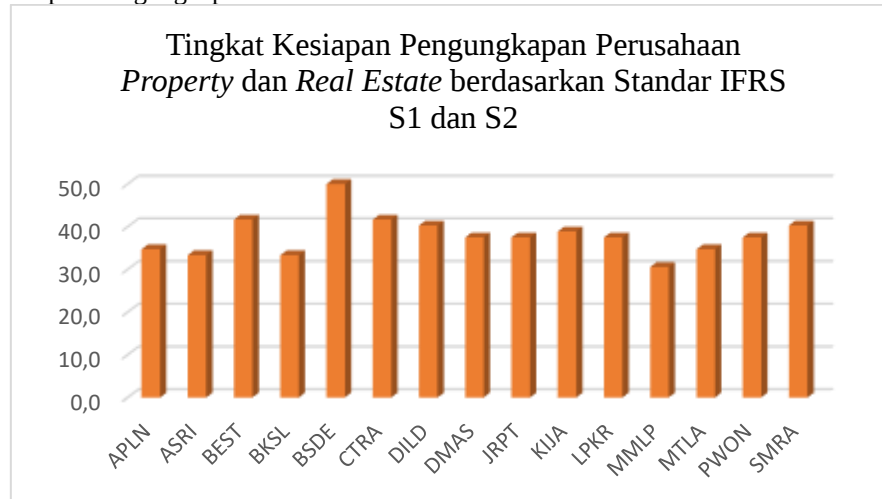
pengungkapan yang bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar keberlanjutan berbasis IFRS masih dalam tahap perkembangan.

Berikut ini adalah tabel skor dengan range 0-3 yang kemudian disajikan dalam bentuk persentase (%) tingkat kesiapan pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan standar IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2022-2025:

Tabel 5. Skor dengan Range 0-3 Tingkat Kesiapan Pengungkapan

No	Kode	Tahun	Transparansi & Data Terverifikasi (S1)	Audit Independen (S1)	Pengungkapan Stakeholder & Kepatuhan (S1)	Emisi Karbon (S2)	Risiko Iklim (S2)	Strategi Net Zero (S2)	Total Skor	Persentase Kesiapan Pengungkapan (%)	Tingkat Kesiapan Pengungkapan
1	APLN	2022	1	1	1	1	1	1	25	34,7	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	1	1	1			
		2025	2	1	1	1	1	1			
2	ASRI	2022	1	1	1	1	1	1	24	33,3	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	1	1	1			
		2025	1	1	1	1	1	1			
3	BEST	2022	2	1	1	1	1	0	30	41,7	Cukup Siap
		2023	2	1	1	1	1	1			
		2024	2	1	1	2	1	1			
		2025	2	1	2	2	1	1			
4	BKSL	2022	1	1	1	1	1	1	24	33,3	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	1	1	1			
		2025	1	1	1	1	1	1			
5	BSDE	2022	1	1	2	2	1	1	36	50,0	Cukup Siap
		2023	1	1	2	2	2	1			
		2024	2	1	2	2	1	1			
		2025	2	1	2	2	2	1			
6	CTRA	2022	1	1	1	2	1	1	30	41,7	Cukup Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	2	1	1	2	1	1			
		2025	2	1	1	2	2	1			
7	DILD	2022	1	1	1	2	1	1	29	40,3	Kurang Siap
		2023	1	1	1	2	1	1			
		2024	1	1	1	2	1	1			
		2025	2	1	1	2	1	1			
8	DMAS	2022	1	1	1	2	1	1	27	37,5	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	2	1	1			
		2025	1	1	1	2	1	1			
9	JRPT	2022	1	1	1	1	1	1	27	37,5	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	2	1	1			
		2025	2	1	1	2	1	1			
10	KIJA	2022	1	1	1	1	1	0	28	38,9	Kurang Siap
		2023	1	1	1	2	1	1			
		2024	2	1	1	2	1	1			
		2025	2	1	1	2	1	1			
11	LPKR	2022	1	1	1	1	1	0	27	37,5	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	0			
		2024	1	1	1	2	2	1			
		2025	2	1	1	2	2	1			
12	MMLP	2022	1	1	1	1	1	0	22	30,6	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	0			
		2024	1	1	1	1	1	1			
		2025	2	1	1	1	1	0			
13	MTLA	2022	1	1	1	1	1	0	25	34,7	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	0			
		2024	2	1	1	2	1	1			
		2025	1	1	1	2	1	1			
14	PWON	2022	1	1	1	2	1	1	27	37,5	Kurang Siap
		2023	1	1	1	1	1	1			
		2024	1	1	1	2	1	1			
		2025	1	1	1	2	1	1			
15	SMRA	2022	1	1	1	2	1	1	29	40,3	Kurang Siap
		2023	2	1	1	2	1	1			
		2024	2	1	1	1	1	1			
		2025	1	1	1	2	1	1			

3.1 Tingkat Kesiapan Pengungkapan Standar IFRS S1 dan S2



Gambar 1. Persentase (%) Tingkat Kesiapan Pengungkapan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* berdasarkan Standar IFRS S1 dan S2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan *property* dan *real estate* berdasarkan indikator IFRS S1 masih diungkapkan secara umum dan belum merata. Penilaian dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu transparansi dan data terverifikasi, audit independen, serta pengungkapan pemangku kepentingan dan tata kelola. Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar perusahaan memperoleh skor yang cukup rendah pada ketiga indikator tersebut, yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip IFRS S1 masih bersifat umum dan berada pada tahap awal.

Berdasarkan indikator IFRS S2, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan terkait perubahan iklim pada perusahaan *property* dan *real estate* meningkat secara bertahap namun pengungkapannya masih harus diintegrasikan kedalam standar IFRS S2. Penilaian dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu pengungkapan emisi karbon, risiko iklim, dan strategi net-zero.

3.2 Kualitas Laporan Keberlanjutan Berbasis IFRS S1 dan S2

Penerapan IFRS S1 dan S2 di sektor *property* dan *real estate* telah berkembang secara bertahap, pengungkapan yang terbatas pada tahun 2022 berkembang menjadi pengungkapan yang lebih rinci pada tahun 2025, menunjukkan dampak arah pelaporan yang lebih baik. Meskipun pengungkapan mengalami perkembangan, skor pada periode penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan masih terbatas pada informasi umum dan belum sepenuhnya siap memenuhi prinsip-prinsip pengungkapan yang disyaratkan IFRS *Sustainability Disclosure Standards*.

Dalam perspektif Teori Legitimasi, peningkatan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan usaha untuk mencapai legitimasi sosial dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan atas praktik bisnis keberlanjutan. Namun, rendahnya skor pada indikator audit independen dan strategi *net-zero* mencerminkan bahwa hampir semua perusahaan masih berada pada tahap *symbolic disclosure* [14]. Sementara itu, dari perspektif Teori Keagenan, ketidakhadiran *assurance independen* mencerminkan adanya *asymetries information* antara perusahaan [15]. *Assurance independen* atau verifikasi dari pihak ketiga, memegang peran penting dalam memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lain bahwa laporan keberlanjutan yang dilaporkan perusahaan tersebut telah disajikan secara objektif dan mencakup seluruh aspek material perusahaan untuk menghindari terciptanya kesenjangan informasi antara management dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Teori institusional menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih lengkap, seperti BSDE, berupaya memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan mengenai komitmen mereka terhadap pengelolaan risiko keberlanjutan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas *sustainability governance* melalui penguatan tata kelola ESG, peningkatan kualitas data ESG, penggunaan *assurance independen*, serta integrasi *sustainability strategy* dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan.

3.3 Tantangan Selama Transisi Penerapan IFRS S1 dan S2

Penerapan standar IFRS S1 dan IFRS S2 dalam penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan mulai melakukan transisi menuju pengungkapan informasi keberlanjutan yang lebih terstruktur, terintegrasi dengan laporan keuangan, serta didukung oleh data yang lebih akurat dan dapat diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan IFRS S1 dan IFRS S2 melalui penyusunan metrik dan target keberlanjutan, penguatan pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim, serta pengembangan sistem pelaporan yang mengacu pada kerangka pelaporan keberlanjutan internasional. Temuan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya transparansi informasi keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi standar tersebut masih berada pada tahap awal sehingga tingkat kesiapan antarperusahaan masih bervariasi. Beberapa perusahaan telah mulai mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam proses bisnis dan tata kelola perusahaan, sedangkan perusahaan lainnya masih terbatas pada pengungkapan informasi yang bersifat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif, terutama dalam aspek penyajian data yang terukur, analisis risiko dan peluang terkait iklim, serta penetapan target keberlanjutan yang didukung indikator kinerja yang jelas.

Selain itu, proses transisi menuju implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa perusahaan menghadapi kendala dalam mengembangkan metodologi pengukuran emisi, memperluas cakupan identifikasi risiko iklim, meningkatkan kualitas dan keterverifikasian data ESG, serta mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan pelaporan keuangan. Tantangan tersebut juga diperkuat oleh kebutuhan investasi pada sistem pelaporan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian proses bisnis agar mampu memenuhi persyaratan pengungkapan yang lebih rinci sesuai dengan standar internasional.

Di samping itu, keterbatasan pemahaman terhadap standar baru dan belum optimalnya kepastian regulasi terkait implementasi *IFRS Sustainability Disclosure Standards* di Indonesia turut memengaruhi tingkat kesiapan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat tata kelola keberlanjutan melalui pengembangan sistem pelaporan ESG yang lebih terintegrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyelarasan strategi keberlanjutan dengan ketentuan IFRS S1 dan IFRS S2. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal, relevan, dan bermanfaat bagi investor maupun pemangku kepentingan lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil content analysis dan penilaian tingkat kesiapan pengungkapan menggunakan skala 0–3, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan perusahaan sektor *property* dan *real estate* dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan berdasarkan standar IFRS S1 dan IFRS S2 masih bervariasi dan secara umum berada pada tahap awal implementasi. Sebagian besar perusahaan telah mulai mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, verifikasi, audit independen, risiko iklim, dan emisi karbon. Namun, kualitas serta kedalaman pengungkapan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya memenuhi komponen yang dipersyaratkan dalam *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. Pengungkapan pada aspek IFRS S1 relatif lebih banyak ditemukan dibandingkan aspek IFRS S2, sedangkan pengungkapan mengenai strategi *net-zero*, target pengurangan emisi gas rumah kaca, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon masih menjadi aspek yang paling terbatas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesiapan antarperusahaan. Beberapa perusahaan telah menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif lebih baik melalui pengungkapan informasi keberlanjutan yang lebih lengkap dan terstruktur, sedangkan sebagian besar perusahaan lainnya masih memiliki keterbatasan dalam penyajian data ESG yang terukur, penggunaan *independent assurance*, serta pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim secara komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek tata kelola keberlanjutan, kualitas data, dan transparansi informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 pada sektor *property* dan *real estate* di Indonesia masih berada pada fase transisi sebelum diberlakukannya standar tersebut secara efektif. Beberapa perusahaan telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip IFRS S1 dan IFRS S2 melalui pengembangan pelaporan ESG, penguatan pengelolaan risiko iklim, serta penyelarasan dengan kerangka pelaporan internasional. Meskipun demikian, proses implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan data dan metodologi pengukuran, pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan informasi keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan investasi untuk mendukung pengelolaan keberlanjutan, serta belum adanya regulasi nasional yang secara spesifik

mengatur penerapan IFRS S1 dan IFRS S2. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas tata kelola keberlanjutan, memperkuat sistem pelaporan ESG, serta mempersiapkan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 agar menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih transparan, andal, dan memenuhi kebutuhan informasi para investor maupun pemangku kepentingan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke sektor-sektor yang memiliki risiko di rantai pasok yang tinggi, namun tingkat kesiapan dalam menyampaikan informasi masih beragam, seperti sektor barang konsumen primer dan transportasi dengan mempertimbangkan untuk mengkaji sektor usaha lain yang relevan dan turut terdampak oleh penerapan standar IFRS S1 dan S2.

Referensi

- [1] I. Sulemana, L. Cheng, A. Osei, A. Osei, and T. Masuni, "Stakeholders and sustainability disclosure : Evidence from an emerging market," *Sustain. Futur.*, vol. 9, no. April 2023, p. 100445, 2025, doi: 10.1016/j.sfr.2025.100445.
- [2] KPMG, "Big shifts , small steps," KPMG International., 2022.
- [3] IFRS Foundation, "IFRS sustainability standards navigator". <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/>. 2023.
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia, "Kebutuhan akan Konektivitas Pengungkapan Keberlanjutan dengan Laporan Keuangan IAI Menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan,". 2025.
- [5] I. P. Dewi and M. W. Rahaditama, "Sustainability reporting disclosure in indonesia, malaysia, singapore, and thailand," vol. 9, no. 1, pp. 1927–1950, 2026, <https://journal.uns.ac.id/index.php/akumulasi/article/view/2096>.
- [6] H. Lusmeida and R. J. Arsiah, "Do enterprise risks management, green intellectual capital and business ethics improve sustainable finance at financial institutions in indonesia?," *Journal of Law and Sustainable Development*. 1–12, 2023, doi: 10.55908/sdgs.v1i12.2359
- [7] M. Dewi, A. Kamiliya, and U. Airlangga, "IFRS sustainability standards implementation readiness: does board of directors matters?," *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*. vol. 13, no. 1, 2023.
- [8] K. N. Kusuma and L. Gani, "Implementation of Published Ifrs S1 and S2 Standards Globaly," vol. 5, no. 3, pp. 943–954, 2024, doi: 10.38035/dijefa.v5i3
- [9] R. A. Supriyono., "Akuntansi Keprilakuan," yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2024.
- [10] K. Hummel and D. Jobst, "An Overview of Corporate Sustainability Reporting Legislation in the European Union An Overview of Corporate Sustainability Reporting Legislation in the European Union," vol. 9480, 2024, doi: 10.1080/17449480.2024.2312145.
- [11] K. A. Fachreza, M. Harvian, N. Zahra, M. I. Islam, M. Daffa, and M. L. Wardiyah, "Analisis Komparatif antara Probability dan Nonprobability dalam Penelitian Pemasaran," vol. 1, no. 3, 2024.
- [12] T. U. Kocamış, G. Kazan, and A. Güngör, "The Applicability of IFRS S1 And S2 in Sustainability Reporting in the Energy Sector : The Case Of Türkiye," vol. 10, no. 1, pp. 18–29, 2026, doi: 10.22495/cgsrv10i1p2.
- [13] A. Agusti and V. Imawati, "Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android Pada teknik dasar lari jarak pendek," pp. 253–262, 2023.
- [14] I. P. E. Arizona, "Symbolic Narrative of Emissions in Sustainability Accounting Reporting," vol. 16, no. 11, pp. 256–271, 2025.
- [15] Z. Arifin, "Pengaruh Asymmetric Information terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi," *Jurnal Siasat Bisnis*, vol. 11, no. 1, 2006.